



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



KAMIS PAHING

26 JANUARI 2023 (4 REJEB 1956 / TAHUN LXXVIII NO 118)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

SEBABKAN KENAIKAN HARGA Wapres: Telusuri Dugaan Permainan Mafia Beras

JAKARTA (KR) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan mendalami apakah benar ada mafia beras yang menyebabkan harga beras meningkat di pasaran akhir-akhir ini.

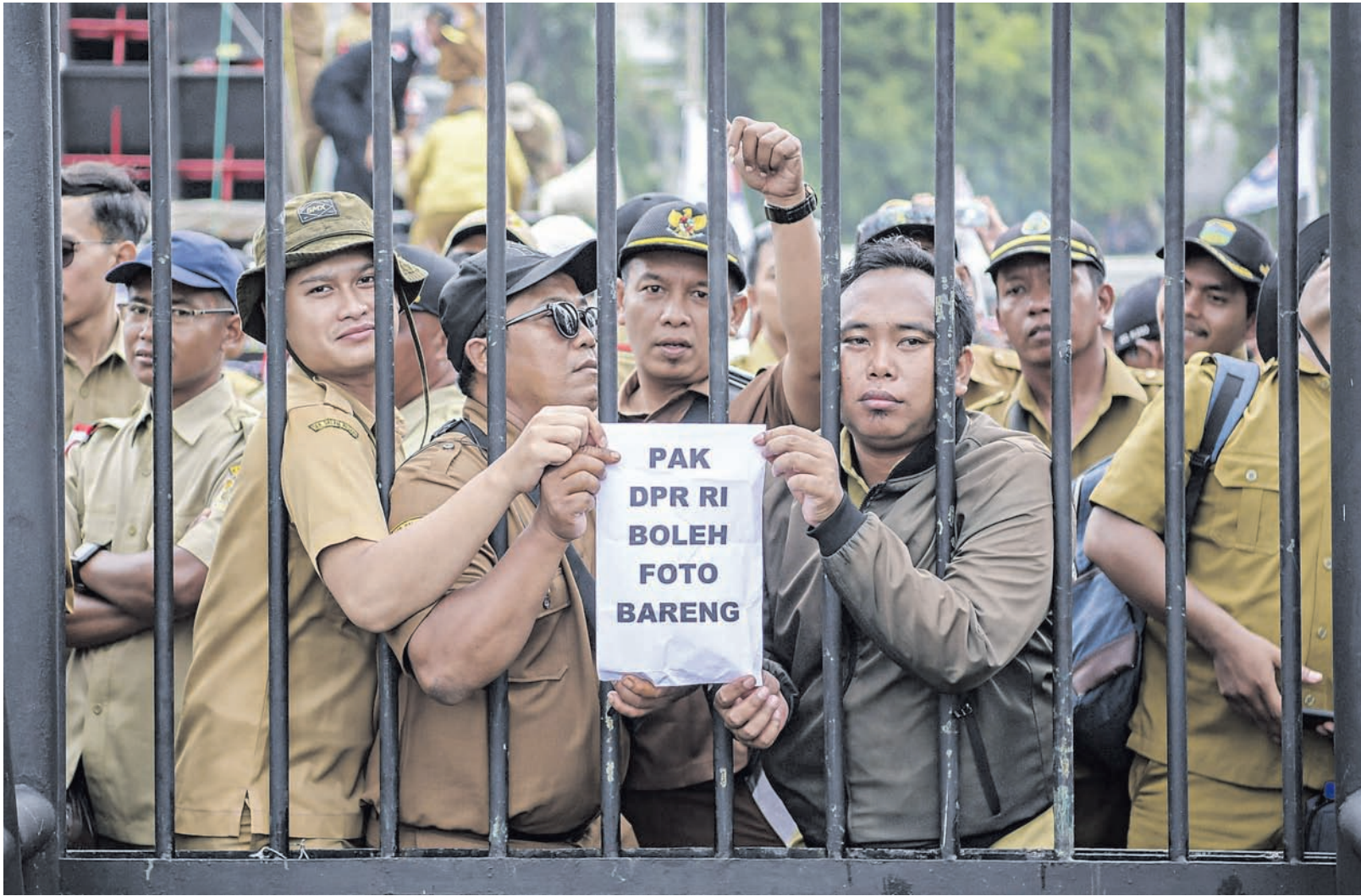
"Kalau masalah mafia harus didalami apa betul ada, saya akan minta pihak terkait untuk menyelidiki hal itu," kata Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu (25/1).

Wapres menyampaikan hal itu usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2023 Kementerian Pertanian bertema 'Memperkuat Sektor Pertanian Sebagai Pengendali Inflasi Dalam Menghadapi Krisis Pangan Dunia'. Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wamentan Harvick Hasnul Qolbi, serta Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyebut soal mafia beras dalam konferensi pers, Jumat (20/1). Buwas mengatakan para mafia memainkan harga beras Bulog sehingga menjadi mahal. Seharusnya harga beras medium dari Bulog dijual Rp 8.300/kg ke pedagang, tetapi pedagang malah mendapat harga yang lebih mahal. Buwas mengungkapkan, bahkan para mafia beras tersebut berani mengadakan rapat di dekat Kantor Perum Bulog.

"Saya kira soal mafia mungkin perlu kita teliti lebih jauh, tapi yang jelas kalau dari produk pertanian kita itu cukup. Hanya memang untuk istilah yang dilakukan itu untuk jaga-jaga saja kalau terjadi apa-apa. Sebenarnya itu cadangan, cadangan saja," tambah Wapres.

* Bersambung hal 7 kol 5



KR-Antara/Galih Pradipta

Massa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, menuntut status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, dan masa jabatan hingga usia 60 tahun, Rabu (25/1/2023).

TANAH SG UNTUK JALAN TOL Sultan: Tak Akan Dijual

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menegaskan, pihaknya tidak akan melepas atau menjual Tanah Kasultanan atau Sultan Ground (SG) yang terdampak pembangunan jalan tol di wilayah DIY. Penggunaan tanah SG untuk jalan tol tersebut hanya bersifat disewakan kepada pihak pengelola jalan tol.



Sultan HB X

KR-Riyana Ekawati

Adapun pembahasan detail terkait sewa-menyewa tanah SG untuk kepentingan tol, sudah difasilitasi Kementerian Hukum dan HAM.

"Kalau untuk tanah SG prinsipnya tidak berubah, disewa, terserah nyewanya, dengan jangka waktu 20 tahun diperpanjang atau 40 tahun. Tapi yang jelas tidak akan dilepas atau dijual. Adapun untuk kesepakatan hukumnya nanti akan difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM bukan Kementerian PUPR," ungkap Sri Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (25/1).

* Bersambung hal 7 kol 5

Analisis KR Kuota dan Biaya

Dr Edy P Saputro



BERAPA masa tunggu ibadah haji setiap daerah? Pasti akan semakin lama ketika rencana biaya haji akan naik menjadi Rp 69 juta tahun ini. Betapa tidak? Dengan kenaikan ini dipastikan pelunasan akan semakin berat. Apalagi kemarin ada pandemi dan kegiatan ekonomi bisnis juga terdampak. Jadi, bukan tidak mungkin imbas kenaikan biaya justru memicu sentimen terhadap pelunasan dan masa tunggu yang semakin lama.

Dualisme *bad news* dan *good news* seputar haji menjadi drama Januari. Padahal Indonesia pada 8 Januari lalu mendapat kepastian kuota haji 2023 yaitu 221 ribu kuota. Rincian dari kuota itu 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus dan petugas 4.200 kuota.

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
Kamis, 26 Januari 2023	11:54	15:15	18:08	19:22	04:16

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

ATASI KEMISKINAN DI DIY Gunakan Danais, Libatkan PT

YOGYA (KR) - Berbagai upaya terus dilakukan Penda DIY untuk mengurangi angka kemiskinan. Mulai dari memberikan bantuan tunai, memanfaatkan Dana Keistimewaan (Danais) untuk mengatasi kemiskinan di desa, sampai melibatkan Perguruan Tinggi (PT) lewat Program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebenarnya tingkat kemiskinan di DIY tidak bisa hanya dilihat dari angka statistik saja, karena masyarakat di DIY memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya, banyak warga yang memiliki aset seperti hewan ternak dan hasil pertanian, tapi aset-aset tersebut tidak menjadi indikator penghitungan kemiskinan.

"Biaya konsumsi masyarakat DIY juga lebih kecil dibanding daerah lain karena harga makanan yang relatif murah."

* Bersambung hal 7 kol 1

Gelar Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPR PPDI Tuntut Kejelasan Status Kepegawaian

JAKARTA (KR) - Tak mau kalah dengan para kepala desa, kini giliran para perangkat desa menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI Jl Gatot Subroto Jakarta Pusat, Rabu (25/1). Perangkat desa se-Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tersebut menuntut kejelasan status kepegawaian perangkat desa.

Sebanyak 44.225 orang perangkat desa dari 22 provinsi di Indonesia menyuarakan pendapatnya di depan Gedung DPR. Berbagai orator perwakilan dari berbagai daerah juga bergantian menyampaikan orasinya. Atribut aksi seperti bendera, spanduk, dan poster terlihat pada seruan aksi tersebut.

"Kita ingin menanyakan kejelasan status kita sebagai perangkat desa. Sampai saat ini belum

ada kejelasan secara tertulis kami termasuk ASN, PNS, honorer, karyawan swasta, atau kuli, kita tidak tahu," ujar Ketua Panitia Silaturahmi Nasional PPDI Cuk Suyadi kepada wartawan.

Para perangkat desa ingin mendapat payung hukum yang jelas terkait status kepegawaian mereka. Selain itu, mereka menuntut penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). "Sejauh ini yang

ada di unsur kepegawaian itu PNS dan P3K. Nah, kita tidak masuk di keduanya. Tuntutan kita perangkat desa dimasukkan dalam unsur kepegawaian itu," tandas Suyadi.

Menanggapi aksi PPDI ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima dan mempelajari tiga poin aspirasi yang disampaikan kepadanya. "Ada tiga yang mau disampaikan, kemarin (Selasa, 24/1), sudah ketemu langsung sama saya. Pertama, mengenai masalah pemberhentian jabatan. Mereka merasa banyak diberhentikan oleh kepala desa. Ketika kepala desanya baru, semua perangkat desa diganti. Padahal, undang-undang sudah mengatur mengenai mekanisme itu," katanya di Hotel Borobudur Jakarta.

Poin kedua, lanjutnya, para perangkat desa meminta agar status jabatan mereka disamakan seperti pegawai negeri sipil (PNS). Terhadap aspirasi itu, menurut Tito, Kemendagri juga perlu melakukan kajian terlebih dahulu karena pelaksanaan permintaan tersebut memerlukan revisi UU Desa. "Nah, ini akan kami kaji karena ini menyangkut revisi UU (Desa)," jelasnya.

Poin ketiga ialah PPDI meminta adanya penghasilan tetap bagi perangkat desa yang berasal dari dana perimbangan. "Mereka minta agar siltap, seperti gaji namanya siltap, penghasilan tetap, itu bisa dari dana perimbangan, tidak berasal dari ADD, alokasi dana desa, karena sering terlambat," kata Tito.

* Bersambung hal 7 kol 1

PUTRI TETAP PADA KEYAKINANNYA Yosua Lakukan Kekerasan Seksual



KR-Antara/Aprilio Akbar

Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Putri Candrawathi (kiri), berbincang dengan kuasa hukumnya.

JAKARTA (KR) - Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Putri Candrawathi (PC) tetap pada keyakinannya, bahwa Yosua mengancam

akan membunuh dirinya dan orang-orang terdekatnya. Putri mengaku sangat ketakutan saat peristiwa tersebut berlangsung, tepatnya 7 Juli 2022.

* Bersambung hal 7 kol 5

Perbaiki Jalan Daerah, Disiapkan Rp 32 Triliun

JAKARTA (KR) - Pemerintah menyiapkan total anggaran Rp 32 triliun untuk memperbaiki jalan daerah di kabupaten, kota, dan provinsi, dalam rangka memperbaiki konektivitas.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharto Monoarfa di Jakarta, Rabu (25/1) mengatakan, sesuai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pemerintah ingin meningkatkan persentase jalan daerah di seluruh Indonesia dengan kondisi mantap menjadi 65 persen dari saat ini hanya 42 persen.

"Kita tahu data yang ada sekarang dari sekitar 480.000 kilometer jalan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, keadaan yang mantap itu hanya 42 persen dan dalam RPJMN itu

minimal kita ingin mencapai 65 persen dan 65 persen itu tentu tidak hanya menjadi beban daerah, tetapi juga menjadi beban kita bersama," ujarnya.

Suharto mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan dan perbaikan jalan daerah di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. "Tadi telah diputuskan akan ada Inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya tentu akan diputuskan bersama," katanya.

* Bersambung hal 7 kol 1

SUNGGUH
SUNGGUH
TERJADI

● MINGGU 15 Januari 2023, saya mengikuti RAT Koperasi Bakti Mulia Kemag Kota Yogyakarta di Gedung Darmaputera Yogyakarta. Saat panitia membacakan pemenang doorprize, ternyata dari sekitar 90 pemenang undian doorprize, 8 di antaranya bernama depan Siti. Termasuk pemenang hadiah utama berupa kulkas, juga bernama Siti. Dra Ayu DW, MTsN 1 Yogyakarta, Mendungan UH VII/566 Yogyakarta)-d

PROMO TAHUN BARU 2023

PROMO SCALLING

PROMO TAMBAL GIGI KOMPOSIT

VAKSIN MENINGITIS

RS PKU Bantul

0818-376-888

DATA KASUS COVID-19

Rabu, 25 Januari 2023

1. Nasional:	2. DIY:
- Pasien positif : 6.728.676 (+274)	- Pasien positif : 230.251 (+5)
- Pasien sembuh : 6.563.060 (+339)	- Pasien sembuh : 224.087 (+19)
- Pasien meninggal : 160.795 (+2)	- Pasien meninggal : 6.077 (+0)

Sumber: Satuan Tugas/Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Pemda DIY. (Ria/ira)

ILUSTRASI JOS